

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum kinerja pemerintahan adalah pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan ataupun program yang dilaksanakan, visi dan misi yang telah dirancang oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang dengan itu masyarakat sangat membutuhkan bukti dari kinerja bupati Kabupaten Sampang yang mempunyai visi dan misi merubah Kota Sampang menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Selain melakukan penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dicapai. Akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pusdiklat BPKP, 2007).

Kabupaten Sampang sebagai objek penelitian menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dari segi ekonomi, sosial dan kondisi geografis yang beragam di wilayah tersebut memberikan kompleks tersendiri dalam mengelola kebutuhan masyarakat. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang. Dan pentingnya penelitian ini terletak pada dedikasi terhadap pemahaman kita bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang serta kebijakan yang di hasilkan. Dengan beberapa faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih baik bagi pemerintahan kabupaten Sampang dalam meningkatkan kinerja bupati dan wakil bupati. Melalui analisis opini publik terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sampang.

Hingga masa akhir jabatan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sampang masih terus berkontribusi untuk memberikan perubahan terhadap Kota Sampang. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Sampang sudah mampu menciptakan pembangunan yang menyeluruh serta rata dan berkelanjutan sejak di pimpin oleh H. Slamet Junaidi selaku Bupati dan dan H. Abdullah selaku Wakil Bupati Kabupaten Sampang. Berbagai program berhasil meluluhkan hati masyarakat, seperti pengobatan gratis, Taman Trunojoyo, jalan lingkar selatan, jalan kabupaten, kecamatan dan desa.

Adapun hal lain pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sampang terjadi demo mahasiswa yang menyuarakan bahwasanya selama 5 tahun memimpin pemerintahan di Kabupaten Sampang dengan adanya penghargaan yang di dapat mulai tingkat regional hingga nasional hanya sebatas ilusi semata atau pencitraan semu. (sumber; rri.co.id-akhir masa jabatan bupati sampang dapat rapor merah)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang, Madura, masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar 22,78 persen. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 22,71 persen. Wahyu Wibowo, selaku Koordinator Fungsi Sosial dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang, menyampaikan bahwa data hasil survei kemiskinan tahun 2020 telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang. Pemaparan tersebut dilakukan di hadapan Bupati H. Slamet Junaidi dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Batu, Malang, pada awal Januari 2021 (beritajatim.com).

Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan turun kembali sebesar 2,15 % menjadi 21,61%. Penurunan ini merupakan penurunan terbesar di Kabupaten Sampang sekaligus terbesar se- Jawa Timur (Sumber: sigap99.com). Dan dari segi sumber daya manusia (SDM) Bupati Sampang dapat mengatasi persoalan tersebut salah satu buktinya yaitu bisa memberikan fasilitas pada mahasiswa yang notabennya warga asal Kabupaten Sampang dengan cara memberikan beasiswa ataupun secara pribadi mengantarkan pemuda-pemudi Sampang sampai pada jenjang S1 (Sumber: sigap99.com)

Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sampang adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Konsep partisipasi yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan oleh Faisal (2007), mencakup dua aspek penting. Pertama, partisipasi sebagai gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara kolektif, dan kedua, sebagai praktik sosial yang melembaga dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan pemahaman ini, keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk kontribusi sesaat seperti pembayaran iuran pendidikan, melainkan harus menjadi bagian dari aktivitas berkelanjutan yang mengawasi jalannya proses pendidikan agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Secara struktural, di Sampang telah dibentuk Komite Sekolah (KS) di setiap jenjang pendidikan dan Dewan Pendidikan (DP), seperti halnya di daerah lain. Secara normatif, lembaga-lembaga ini memiliki fungsi sebagai badan pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengawas (controlling agency), dan mediator (mediator agency). Namun, implementasi fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara

maksimal. Berdasarkan informasi dari sejumlah tokoh masyarakat, Komite Sekolah umumnya hanya aktif dalam pertemuan awal tahun ajaran yang fokus pada kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Sementara itu, Dewan Pendidikan juga belum dapat menjalankan peran secara efektif karena lemahnya koordinasi dan konsolidasi antaranggota. Dengan melihat ketiga permasalahan penting ini, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk-bentuk kemitraan antara masyarakat dan sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sampang. (Sumber: //humanity.volume.8.nomor.1.2012//).

Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sampang difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keluarga secara menyeluruh. Tujuan utamanya mencakup peningkatan produktivitas tenaga kerja, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan pribadi maupun lingkungan sekitar. Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan (Yankes) agar lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Upaya lain yang menjadi prioritas adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan kesehatan, memperbaiki status gizi masyarakat, memperluas cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), meningkatkan jumlah tenaga medis yang kompeten, serta memperkuat sarana dan prasarana kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sampang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang menggelar sosialisasi program JKN KIS bagi para Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan kerja Kemenag Sampang. (<https://jatim.kemenag.go.id/berita/506636/jamin-kesehatan-pegawai-non-pns-kemenag--sampang-gandeng-bpjs-kesehatan-sosialisasikan-jknkis>).

Terlepas dari beberapa hasil kinerjanya, sebagaimana menjadi orang nomor satu di Sampang pasti ada beberapa pro dan kontra dari masyarakatnya yang mengisi perjalanan masa pemerintahan beliau yang mana dalam ini disebut dengan opini publik. Opini Publik atau pendapat umum merupakan pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Opini Publik juga merupakan proses yang menggabungkan pikiran dan perasaan dari masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang disebutkan di atas, isu merupakan tahap awal munculnya opini publik. Permasalahan, pertikaian ataupun perselisihan yang dapat menimbulkan dan berpotensi

menjadi isu sehingga dapat berujung pada kemunculan opini publik ketika isu tersebut menjadi isu umum dan sifatnya kontroversi dan sangat berpengaruh untuk banyak orang. Opini Publik dalam penelitian ini sangat dibutuhkan dan berpengaruh karena pendapat masyarakat Kabupaten Sampang ini sangat penting untuk kemajuan dan pengembangan dalam mewujudkan Kota Sampang yang lebih baik. Apabila masyarakat sampang memberikan pendapatnya sangat lebih baik dan dapat menjadi acuan untuk dijadikan sebagai opsi untuk memberikan perubahan-perubahan yang akan datang sehingga dapat sangat berpengaruh atas tindakan yang akan terealisasikan di Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka merumuskan masalah yaitu bagaimana opini publik terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Periode 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui opini publik terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang antara lain adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menambah kajian dalam penelitian tentang gaya kepemimpinan Bupati dan Wakilnya berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan perbaikan sistem kepemimpinan yang ada di daerah karena adanya opini publik di Kabupaten Sampang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang dan masyarakat yang belum mengetahui tentang pemerintahan yang ada di Kabupaten Sampang melalui opini publik.